

SKRIPSI

**PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KOPI
DI KECAMATAN BUNTU PEPASAN KABUPATEN TORAJA UTARA**

**Untuk Memenuhi
Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh :

**RIKYANTO TANDI RORRONG
E051191018**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**PERAN DINAS PERTANIAN DALAM
PEMBERDAYAAN PETANI KOPI DI
KECAMATAN BUNTU PEPASAN KABUPATEN
TORAJA UTARA**

OLEH

**RIKYANTO TANDI RORRONG
E051191018**

SKRIPSI
Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI
KOPI DI KECAMATAN BUNTU PEPASAN KABUPATEN TORAJA
UTARA

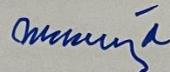
Disusun dan diajukan oleh:

RIKYANTO TANDI RORRONG
E051191018

Menyetujui:

Pembimbing I

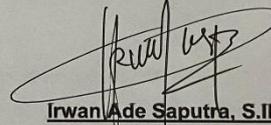
Pembimbing II



Prof. Dr. H. Rasyid Thaha,

M.Si

NIP. 19570707 198403 1005



Irwan Ade Saputra, S.IP,M.S

NIP. 19840416 202204 3001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. A. Lulman Iwan, M.Si
NIP.197901062005011001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIKYANTO TANDI RORRONG

NIM : E051191018

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul:

**“PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KOPI
DI KECAMATAN BUNTU PEPASAN KABUPATEN TORAJA UTARA”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 September 2024

Yang membuat pernyataan



RIKYANRO TANDI RORRONG

KATA PENGANTAR

“Sebab Tuhan memberi hikmat; dari mulut-Nya datang pengetahuan dan pengertian” (Amsal 2:5)

Shalom, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, penyertaan dan kasih setia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Petani Kopi di Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, adapun kendala-kendala yang diluar kendali penulis yang beberapa kali terjadi selama penyusunan skripsi ini, namun Puji Tuhan karena kasih setia-Nya dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Lewat kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada kedua Orang tua tercinta dan terkasih **Lukas Lino** dan **Agustina Salu**. Terimakasih untuk segala doa, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin. Terimakasih juga kepada saudara-saudara penulis, **Dermawanti, Melyana, Febryanti, Indri, Agnes** yang menjadi support system terbaik bagi penulis yang selalu memperhatikan dan memberikan dukungan bagi penulis baik berupa tenaga, materi dan pikiran, tatkala penulis menemui kendala baik pada masa-masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Semoga selalu dalam kebaikan bersama orang terkasih. Tanpa cinta dan dukungan dari kalian semua, mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.

Terimakasih juga kepada **Nenek dor** dan **Nenek mitha** kedua sosok yang selalu menginspirasi anak-anaknya sampai pada cucu-cucunya untuk terus menjalani hidup yang telah di karunikan Tuhan .Terima kasih karena selalu menasehati dan memberikan kasih sayang kepada penulis selama menjalani kehidupannya.

Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di kampus Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Phil. Sukri, S.IP. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para wakil Dekan dan jajarannya.
3. Dr. Andi Lukman Irwan, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir ini (Skripsi).

4. Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan arahan, saran, serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai bapak.
5. Irwan Ade Saputra, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak vii penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai dan memberikan arahan, saran, serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai bapak
6. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin S.IP, M.Si, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan

sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

8. Para staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam pelayanan administrasi untuk penyelesaian skripsi ini terkhusus Pak Mardi Terima kasih atas bantuannya.
9. Seluruh staf tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam hal persuratan dan pelayanan administrasi.
10. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah menerima dengan baik serta memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam sesi wawancara dan pengumpulan data.
11. Kepada Camat dan seluruh staf kecamatan buntu pepasan, Ketua dan jajaran dinas pertanian toraja utara terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas bantuan dan kerja samanya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Keluarga Besar persekutuan mahasiswa kristen oikumene fisip unhas atas ruang belajar selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
13. Ilmu Pemerintahan 2019. Terima kasih telah bersama-sama mengemban ilmu dalam lingkaran jurusan yang sama, semoga teman-teman ilmu pemerintahan sukses dan berkah ilmunya.

14. Teman-teman “Fides” yang telah menjadi teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan maupun ber-organisasi terima kasih untuk kebersamaan dari awal kuliah sampai menyanggah gelar sarjana. Untuk pengalaman, pelajaran hidup, bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga kita masih punya waktu untuk dapat bertemu kembali.
15. Teman -Teman “Telkomas Squad”, nicolas, markus, febrin, friel, regina, arsel terima kasih telah berbagi kebersamaan, memberi semangat, bantuan disegala urusan, serta menemani perjalanan penulis selama masa perkuliahan hingga sekarang, semoga kesuksesan senantiasa bersama kalian.
16. Teman-teman “Pata’padang”, yang menjadi kawan penulis selama KKN dan penelitian di Kelurahan Talaka, Terimah kasih atas kebaikan dan kebersamanya serta tumpangan rumahnya selama penulis berada di Pata’padang.
17. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Gel. 108 desa wisata II. Terimah kasih atas kebersamaan dan kerjasama yang baik antar kita semua. Semoga di lain kesempatan dapat berjumpa kembali dengan cerita sukses masing-masing.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca. akhir kata penulis mengucapkan maaf atas segala kekurangan. Terima Kasih.

Makassar 24 September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Peran	10
2.2. Peran Pemerintah.....	14
2.3. Pemberdayaan Masyarakat Tani	18
2.4. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
3.2. Lokasi Penelitian.....	26
3.3. Fokus Penelitian	26
3.4. Informan.....	27
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6. Jenis Data.....	28
3.7. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian.....	31

4.1.1 Visi Misi Kabupaten Toraja Utara	42
4.1.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.3 Gambaran Umum Perkebunan Kopi Kabupaten Toraja Utara .	46
4.1.4 Profil Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara.....	57
4.1.5 Visi Misi Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara.....	59
4.1.6 Susunan Organisasi	59
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	63
4.2.1 Peran Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara dalam Pelaksanaan Penyuluhan Budidaya hingga Pasca Panen	63
4.2.2 Pelaksanaan Rehabilitasi Tanaman Kopi oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Toraja Utara	73
4.2.3 Intensifikasi Pemberian Pupuk oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Toraja Utara	79
4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Kopi di Kabupaten Toraja Utara	85
4.3.1 Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Penyuluhan Budidaya hingga Pasca Panen.....	85
4.3.2 Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Rehabilitasi Tanaman Kopi oleh Dinas Pertanian di kecamatan buntu papasan Kabupaten Toraja Utara	93
4.3.3 Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Pelaksanaan intesifikasi pupuk oleh Dinas Pertanian di Kecamatan buntu pepasan Kabupaten Toraja Utara	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
5.1. Kesimpulan	100
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Produksi Tanaman Perkebunan Kopi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020	4
Tabel 1. 2 Data Produksi Tanaman Perkebunan Kopi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021	5
Tabel 1. 3 Data Produksi Tanaman Perkebunan Kopi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022	6
Tabel 4. 1 Data Tabel Penyuluhan	69
Tabel 4. 2 Tamaman Kopi yang Direhabilitasi di Kecamatan Buntu Pepasan	76
Tabel 4. 3 Data Jumlah Intensifikasi Pupuk di Kecamatan Buntu Pepasan ..	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Administratif Toraja Utara	34
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi	62

ABSTRAK

RIKYANTO TANDI RORRONG, dengan Nomor Induk Mahasiswa E051191018 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, sedang menyusun skripsi berjudul "**Peran Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Petani Kopi Di Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara**", di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si sebagai Pembimbing I dan Irwan Ade Saputra, S.IP,M.Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dinas pertanian dalam pemberdayaan petani kopi di kecamatan buntu pepasan kabupaten toraja utara. Rumusan masalah penelitian difokuskan pada peran dinas pertanian dalam pemberdayaan petani kopi dan faktor faktor apa saja yang mempengaruhi . Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Pertanian memiliki peran strategis dalam memberikan penyuluhan yang komprehensif kepada petani kopi. Rehabilitasi tanaman kopi menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan produktivitas. Dinas Pertanian berkomitmen untuk mengganti tanaman yang tidak produktif dengan bibit berkualitas dan memberikan pelatihan kepada petani untuk memastikan keberhasilan proses rehabilitasi. Dinas Pertanian mengintensifkan pemberian pupuk dengan menyediakan pupuk yang tepat sesuai kebutuhan tanaman kopi. Penyuluhan mengenai cara penggunaan pupuk yang benar menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Kata Kunci: *Peran, Dinas Pertanian, Petani Kopi, Pemberdayaan, Kecamatan Buntu Pepasan*

ABSTRACT

RIKYANTO TANDI RORRONG, with Student Registration Number E051191018 from the Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, is currently compiling a thesis entitled "**The Role of the Department of Agriculture in Empowering Coffee Farmers in Buntu Pepasan District, North Toraja Regency**", under the guidance of Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si as Supervisor I and Irwan Ade Saputra, S.IP, M.Si as Supervisor II.

This study aims to determine and analyze the role of the agricultural office in empowering coffee farmers in Buntu Pepasan District, North Toraja Regency. The formulation of the research problem is focused on the role of the agricultural office in empowering coffee farmers and the factors that influence it. Data collection techniques include interviews, observations, and literature studies.

The results of this study indicate that the Agricultural Office has a strategic role in providing comprehensive counseling to coffee farmers. Coffee plant rehabilitation is an important focus in efforts to increase productivity. The Agricultural Office is committed to replacing unproductive plants with quality seeds and providing training to farmers to ensure the success of the rehabilitation process. The Agricultural Office intensifies fertilizer provision by providing the right fertilizer according to the needs of coffee plants. Counseling on how to use fertilizer correctly is a priority to increase efficiency and yields, while reducing the risk of environmental damage.

Keywords: *Role, Department of Agriculture, Coffee Farmers, Empowerment, Buntu Pepasan District*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 tentang peran pemerintah yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memberikan arti bahwa pemerintah mempunyai peran sentral dalam pembangunan nasional dalam kesejahteraan rakyat.

Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah masyarakat agraris maka sumbangsi yang berpotensi besar dalam pembangunan nasional adalah bidang pertanian, ditunjukkan oleh Sebagian besar pendapatan mereka berasal dari produk pertanian seperti tanaman pangan, perkebunan, perternakan, perikanan dan kehutanan. Kenyataan yang harus diakui bahwa sector pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil.

Sektor perkebunan di Indonesia merupakan sektor penting dalam pendapatan devisa negara. Salah satu perkebunan yang memberi kontribusi besar adalah perkebunan kopi. Lokasi geografis Indonesia memang sangat cocok untuk menanam kopi karena iklim mikro ideal untuk pertumbuhan dan produksi kopi.

Bahkan hingga saat ini, Indonesia menempati peringkat keempat terbesar di dunia dari segi hasil produksi kopi. Kopi di Indonesia memiliki sejarah panjang dan berperan penting karena kontribusinya terhadap ekonomi negara.

Perkebunan kopi memegang peranan penting dalam pengembangan industri perkebunan. Total produksi kopi Indonesia mencapai 660.000 ton pada tahun 2019-2022 dan menempati urutan keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia.

Peranan industri kopi terhadap struktur perekonomian Indonesia cukup besar. Berdasarkan penelitiannya pun, terbukti perkebunan kopi mampu mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Selain itu, perkebunan kopi berperan untuk memelihara kelestarian lingkungan, sebagai asal bahan baku bagi industri makanan atau minuman, serta menyediakan lapangan pekerjaan melalui kegiatan pengolahan, pemasaran, serta perdagangan ekspor dan impor.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan hasil kopinya. Kopi merupakan hasil perkebunan di daerah Sulawesi Selatan terutama di Kabupaten Toraja Utara yang cukup menjanjikan. Sehingga dikenal dengan nama "Kopi Toraja" yang sangat di gemari pencinta kopi di Indonesia bahkan mancanegara. Terkait kualitas kopi, Toraja sangat terkenal dengan kualitas premium hasil produk kopinya. Bukan karena bagaimana perlakuan yang diberikan kepada tanaman kopi, melainkan faktor alamiah dari lokasi tersebut yang para ahli kopi katakan

membuat kualitas kopi Toraja memiliki kualitas premium. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah ketinggian lokasi penanaman kopi kopi yang berada ≥ 1500 mdpl.

Proses penanaman sampai pemanenan kopi toraja itu sendiri dilakukan secara tradisi turun temurun oleh masyarakat Toraja yang tetap dijaga sampai sekarang yang memberikan produksi kopi dengan kualitas premium selain dari kondisi alam Toraja itu sendiri yang memberi cita rasa tersendiri pada kopi toraja.

Namun beberapa tahun terakhir, produksi kopi di Kabupaten Tana Toraja khususnya kopi jenis arabika mengalami penurunan baik itu kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti musim hujan yang terus-menerus, pohon kopi yang sudah tidak produktif serta generasi millennial untuk petani kopi sudah sangat jarang. Adapun angka produksi tanaman perkebunan kopi jenis arabika dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. 1 Data Produksi Tanaman Perkebunan Kopi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020

No	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Produksi (TON)	PRODUKTIVITAS (KG/HA)
1	DENDE PIONGAN NAPO	875.5	486	680
2	SOPAI	235	149	648
3	SANGGALANGI	0	0	0
4	KESU	0	0	0
5	BUNTAO	68.5	12.7	493
6	RANTEBUA	174	70	560
7	NANGGALA	131	34	391
8	TONDON	56.75	15	408
9	RINDINGALLO	1005	892	1349
10	AWAN RANTE KARUA	907	768	1278
11	KAPALA PITU	855	402	680
12	BARUPPU'	792	909	1578
13	BUNTU PEPASAN	2,110	1,113	680
14	SESEAN	366.5	224	680
15	BANGKELE KILA'	359	207	683
16	SESEAN SULOARA'	368.5	186	681
17	SA'DAN	416	221	686
18	BALUSU	13	0.70	233
19	RANTEPAO	5.25	0.80	195
20	TIKALA	340.4	137	668
21	TALLUNGLIPU	10	0.26	130
JUMLAH		9108.7	5,827	866

Sumber : Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Toraja Utara. 2023

Tabel 1. 2 Data Produksi Tanaman Perkebunan Kopi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

No	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Produksi (TON)	PRODUKTIVITAS (KG/HA)
1	DENDE PIONGAN NAPO	853.75	476	661
2	SOPAI	235	256	1089
3	SANGGALANGI	0	0	0
4	KESU	0	0	0
5	BUNTAO	68.5	13	493
6	RANTEBUA	774	340	495
7	NANGGALA	116	35	361
8	TONDON	41	15	714
9	RINDINGALLO	938	595	802
10	AWAN RANTE KARUA	1116	916	1021
11	KAPALA PITU	785	689	1166
12	BARUPPU'	832	930	1560
13	BUNTU PEPASAN	2,110	860	1103
14	SESEAN	504	270	578
15	BANGKELE KILA'	379	260	805
16	SESEAN SULOARA'	389.5	275	935
17	SA'DAN	457	225	678
18	BALUSU	13	0.80	267
19	RANTEPAO	5.1	0.90	220
20	TIKALA	387.4	155	615
21	TALLUNGLIPU	10	0.26	130
JUMLAH		9108	6,312	892

Sumber : Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Toraja Utara. 2023

Tabel 1. 3 Data Produksi Tanaman Perkebunan Kopi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

No	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	Produksi (TON)	PRODUKTIVITAS (KG/HA)
1	DENDE PIONGAN NAPO	853.75	380.2	528
2	SOPAI	235	190.2	809
3	SANGGALANGI	0	0	0
4	KESU	0	0	0
5	BUNTAO	68.5	9.8	493
6	RANTEBUA	774	298	434
7	NANGGALA	116	29.5	304
8	TONDON	41	10.5	500
9	RINDINGALLO	938	498.8	672
10	AWAN RANTE KARUA	1116	696.2	776
11	KAPALA PITU	785	489.3	828
12	BARUPPU'	832	789	1339
13	BUNTU PEPASAN	2,110	587	753
14	SESEAN	504	198.8	426
15	BANGKELE KILA'	379	182	563
16	SESEAN SULOARA'	389.5	192.5	655
17	SA'DAN	458	157.5	474
18	BALUSU	13	0.56	187
19	RANTEPAO	5.1	0.63	154
20	TIKALA	387.4	134.8	535
21	TALLUNGLIPU	10	0.18	90
JUMLAH		9109	4.854	686

Sumber : Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Toraja Utara. 2023

Permasalahan kopi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan petani kopi di masa kini, namun juga berdampak pada kesejahteraan petani kopi di masa mendatang bahkan warisan kualitas kopi toraja yang akan rusak hingga lambat laun tidak diminati lagi. Oleh karena itu peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan diatas, salah satunya adalah Pemerintah daerah melalui dinas pertanian diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinyatakan bahwa Dinas Pertanian memiliki beberapa tugas dan fungsi lain seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan, memastikan ketersediaan pupuk, hingga memberikan jalinan kerja sama antara pihak bank, umkm serta petani kopi, juga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelestarian Genetika Kopi Arabika Tipika Toraja serta yang tertuang pada RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Toraja Utara yaitu pada bagian peruntukan Kawasan sentra komoditas kopi pada wilayah-wilayah yang telah disebar.

Tetapi berdasarkan observasi awal penulis, hingga saat ini program-program tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini didasarkan pada minimnya akses masyarakat untuk memperoleh pelatihan dalam meningkatkan kapasitas dalam Bertani, alat yang kurang memadai dan juga sangat kurangnya regenerasi penerus untuk terus membudidayakan kopi.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis merasa perlu dan penting dalam melakukan penelitian terhadap “ **PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KOPI DI KECAMATAN BUNTU PEPASAN KABUPATEN TORAJA UTARA**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dinas pertanian Kabupaten Toraja Utara dalam pelaksanaan pemberdayaan petani kopi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Toraja Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan peran dinas pertanian dalam pelaksanaan pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Toraja Utara seperti penyuluhan, rehabilitasi dan intesifikasi pupuk.
2. Untuk menggambarkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Toraja Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan terutama kajian mengenai dinas pertanian dalam pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Toraja Utara.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana Peran dinas pertanian dalam pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Toraja Utara
3. Manfaat Metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan juga bisa dibandingkan dengan penilitian ilmiah

lainnya terutama yang berkaitan dengan dinas pertaniandalam pemberdayaan petani kopi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran

Peran adalah seperangkat yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kata peran dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti “pemain sandiwara”. Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan juga diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Peranan-peranan yang tepat yang dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh para individu.

Teori peran (role theory) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut (Soekanto, 2012: 221).

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan

kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

- a) Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang

seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

- c) Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- d) Peran sosial adalah perilaku dan tindakan yang diharapkan oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat atau lingkungan tertentu.

Secara umum struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Peran Formal Peran formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lain-lain.
- b) Peran Informal Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- a) Peran Aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
- b) Peran Partisipasif, adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- c) Peran Pasif, adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Peran sosial melibatkan norma dan nilai yang diterima oleh masyarakat dalam memandang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Berikut adalah definisi peran menurut beberapa ahli:

1. Talcott Parsons: Peran adalah pola perilaku yang dapat diharapkan dari orang yang memegang posisi atau status tertentu dalam sistem sosial.
2. George Herbert Mead: Peran adalah bentuk interaksi sosial dimana individu memainkan suatu karakter, seperti orang tua atau guru, dan kemudian bertindak sesuai dengan karakter tersebut.
3. Robert K. Merton: Peran adalah harapan atau ekspektasi yang ditempatkan pada seseorang yang mengemban status tertentu dalam masyarakat.

4. Erving Goffman: Peran adalah cara individu menyusun dan menyajikan diri mereka sendiri kepada orang lain, termasuk dalam interaksi sosial dan di berbagai situasi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

2.2. Peran Pemerintah

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya - sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. (Riyadi, 2004). Dalam pengertian ini pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Dengan ini pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang terapkan.

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberi acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerintah sebagai dinamisator, yaitu mengerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam

memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

3. Pemerintah sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.
4. Pemerintah sebagai katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat penembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Menurut (Ndraha, 1987) menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang pemimpin, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di lingkungan masyarakat maupun pemerintah.

Menurut (Rasyid, 2000) menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi

yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan /dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development)." Dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Peran dan Fungsi pemerintah daerah adalah sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah merupakan pemerintah yang memiliki kewenangan yang strategis dan mempunyai kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, keadilan, kemakmuran serta ketentraman bagi masyarakat (Hayat., 2018).

Ada 4 peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu:

- a. Entrepreneur yaitu pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha.
- b. Koordinator sebagai menetapkan kebijakan dan mengusulkan strategi dalam pembangunan.
- c. Fasilitator sarana dan prasarana.

- d. Stimulator yaitu sebagai pendorong dalam pengembangan usaha melalui tindakan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu polasikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasidiri. Peran juga diartikan sebagai serang kaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial.

2.3. Pemberdayaan Masyarakat Tani

Menurut Sulistiyani sevara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh dayalkekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian dayal kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya".

Berbeda dengan pendapat Pranarka Sumodiningrat menyampaikan bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi "daya" bukan "kekuasaan" dari pada "

pemberdayaan" itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah "energize" atau katakan memberi "energi" pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Bertolak pada kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan empowerment lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya".

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), terciptanya kemandirian.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong,

memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

- (1) Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang serta harus dilakukan

Dalam rangka memperoleh meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka". Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan

utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek.

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (wikipedia-indonesia). Pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling)

Priyono memberikan makna pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin

efektif secara struktural. baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi dan lain-lain. Memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, men-swadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Keberdayaan masyarakat, adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (survive) dan (dalam pengertian yang dinamis) mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk (terus menerus) meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat "bawah" yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (accountable) demi perbaikan kehidupannya Empowerment atau pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice).

Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang diberdayakan. Dasar pemikiran suatu obyek atau target group perlu diberdayakan karena obyek tersebut mempunyai keterbatasan, ketidakberdayaan, keterbelakangan dan kebodohan dari berbagai aspek. Oleh karenanya guna meng-upayakan kesetaraan serta untuk mengurangi kesenjangan diperlukan upaya merevitalisasi untuk mengoptimalkan utilitas melalui penambahan nilai. Penambahan nilai ini dapat mencakup pada rang bidang aspek sosial, ekonomi, kesehatan, politik dan budaya.

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses tumbuhnya kekuasaan serta kemampuan baik individu maupun kelompok masyarakat yang mash miskin, terpinggirkan dan belum berdaya. Melalui proses pemberdayaan diharapkan kelompok masyarakat masyarakat bawah dapat terangkat menjadi kelompok manusia yang menengah dan atas. Hal tersebut dapat terjadi bila mereka diberikan kesempatan serta fasilitas dan bantuan dari pihak yang terkait. Kelompok masyarakat miskin di pedesaan sulit untuk melakukan proses pemberdayaan tanpa adanya bantuan dan fasilitas.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- (1) Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.

- (2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- (3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

2.4. Kerangka Pikir

